

KAISAR DAN DEMOKRASI DI JEPANG

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai

Salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh :

YEFWIANA CHARISMA

Nim : 02110126



PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2006

Halaman pengesahan

Skripsi Sarjana Yang Berjudul:

KAISAR DAN DEMOKRASI DI JEPANG

Telah Diuji dan Diterima baik oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Sastra Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang pada Hari Jumat, Tanggal 1 Desember 2006.

Ketua Penguji



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Pembimbing/Penguji



(Nani Dewi Sunengsih, S.S., M.Pd)

Panitera/Penguji



(Zainur Fitri, S.S)

Pembaca/Penguji



(Syamsul Bahri, S.S)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Sastra



(Dra. Hj. Albertine S. Minderop, MA)

Ketua Jurusan Jepang



(Syamsul Bahri, S.S)

Halaman pernyataan

Skripsi Sarjana Yang Berjudul:

KAISAR DAN DEMOKRASI DI JEPANG

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd dan Bapak Syamsul Bahri S.S bukan merupakan jiplakan skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruh isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta, Desember 2006.

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum wr wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah robbi, atas segala rahmat, hidayah dan ilmu yang dilimpahkan-Nya, karena penulisan skripsi yang penulis beri judul "Kaisar dan Demokrasi di Jepang" dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis menyadari bahwa atas bantuan dari banyak pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, MPd, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun ditengah kesibukannya.
2. Ibu Dr. Hj. Albertine S.M, M.A, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
3. Bapak Syamsul Bahri, S.S, selaku Pembaca Skripsi dan Ketua Jurusan Jepang.
4. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Ketua Sidang Skripsi.

5. Ibu Metty Suwandhani, S.S, selaku Sekretaris.
6. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Sastra yang telah memberikan ilmu dan pengajaran.
8. Seluruh staf karyawan sekretariat, Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.
9. Seluruh staf karyawan perpustakaan, Universitas Darma Persada.
10. Kedua Orang Tua dan Keluarga saya tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
11. Kakak-kakak ku dan kakak iparku (Dape n dan Kak Yosep) yang tidak pernah bosan memberikan perhatian dan doanya sehingga tercapainya cita-cita penulis.
12. Nurul, teman SMP dan teman seperjuangan ku.
13. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan inspirasi, Nadya, Om Sofar, Mala, dan rekan-rekan lain yang tidak dapat ditulis satu persatu, makasih banyak atas bantuannya.
14. Teman-teman Rumah yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Evi, Rika, Ombi.
15. Mas heru, yang telah memberikan kasih sayang, doa dan membantu penulis menulis skripsi ini hingga selesai.
16. Rekan-rekan dari Fakultas Sastra khususnya Angkatan 2002.

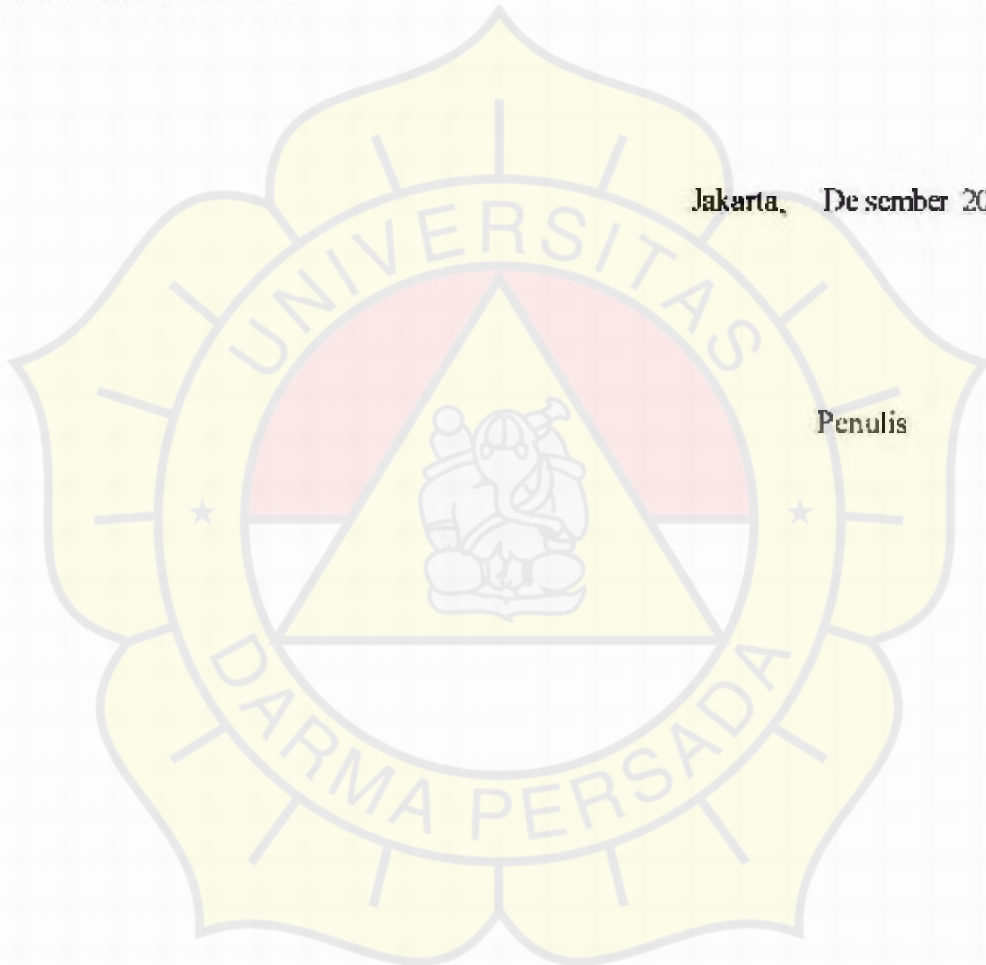
17. Semua pihak yang sudah membantu namun tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, Desember 2006

Penulis



ABSTRAK

Yefwiana Charisma. **KAISAR DAN DEMOKRASI DI JEPANG**. Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. Jakarta, Desember 2006.

Jepang merupakan negara kekaisaran sekaligus sebagai negara demokrasi. Kedudukan kaisar di Jepang sepanjang sejarah tidak pernah memegang langsung kekuasaan eksekutif, kecuali pada jaman purba. Begitu pula ketika pada tahun 1867 didengungkan bahwa kekuasaan dikembalikan kepada kaisar dan Undang-Undang Dasar Meiji menetapkan kedaulatan ada di tangan kaisar, namun pada kenyataannya yang memegang kendali pemerintahan adalah para samurai dari Satsuma dan Choshu. Jepang sebagai negara demokrasi di mulai pada jaman Meiji namun baru pada masa pendudukan sekutu, demokrasi di Jepang mulai ditegakkan di bawah payung Undang-Undang Dasar 1946. Adapun kedudukan kaisar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1946 ini adalah sebagai lambang negara dan kesatuan rakyat.

DAFTAR ISI

HALAMAN ERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN SINGKAT TENTANG SEJARAH JEPANG SEBELUM TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN KONSTITUSIONAL	
A. Jepang Sebagai Negara Ke k a i s a r a n.....	8
B. Keshogunan Tokugawa.....	9
C. Masa Meiji.....	12

D. Permulaan Pemerintahan Konstitusional	14
--	----

BAB III KAISAR DAN DEMOKRASI DI JEPANG

A. Pergerakan Demokrasi di Jepang	20
---	----

1. Pengertian Demokrasi	20
-------------------------------	----

2. Latar Belakang Demokrasi di Jepang	22
---	----

a. Jiyu Minken Undo.....	22
--------------------------	----

1) Proses Kelahiran	24
---------------------------	----

2) Proses Meningkatnya Gerakan Demokrasi	24
--	----

3) Proses Kebuntuan.....	25
--------------------------	----

b. Demokrasi Taisho	27
---------------------------	----

3. Pergerakan Demokrasi di Jepang.....	29
--	----

B. Kedudukan Kaisar	32
---------------------------	----

1. Jaman Meiji	32
----------------------	----

a. Undang-Undang Dasar Meiji.....	32
-----------------------------------	----

b. Peranan dan Kedudukan Kaisar dalam Pemerintahan Masa Awal-awal Meiji	33
---	----

c. Peran dan Kedudukan Kaisar Setelah terbentuk dan disahkannya Konstitusi Meiji	34
--	----

2. Jaman Taisho	35
-----------------------	----

3. Jaman Showa.....	35
---------------------	----

a. Masa Awal-awal Showa.....	35
------------------------------	----

b. Peran Kaisar Hirohito dalam Menyelamatkan Bangsa dan Negara Jepang dari Kehancuran Pada Perang Dunia II.....	36
4. Pasca Perang Dunia II.....	37
a. Undang-Undang Dasar 1946.....	37
b. Posisi Kaisar	39
C. Diet Nasional	40
1. Badan Legislatif	40
2. Badan Eksekutif.....	42
3. Peradilan	43
BAB IV KESIMPULAN	46
GLOSARI	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang sejak berdirinya negara ini tepatnya tahun 660 SM merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Kepala negaranya disebut kaisar. Dalam hal ini yang menjadi kaisar adalah sebuah keluarga secara turun temurun (Kaisar Akihito yang berkuasa sekarang (2006) adalah pemegang tahta generasi ke-125).¹ Ada anggapan bahwa kaisar Jepang adalah keturunan dewa, maka walaupun pada suatu masa kaisar tidak memiliki kekuasaan secara langsung, kaisar dan keluarganya ditempatkan sedemikian rupa. Artinya kaisar tetap dihormati karena merupakan lambang keagungan dan kesucian Jepang yang berasal dan bersumber pada dunia dewa-dewa.

Seiring dengan perkembangan sejarah, pada masa Meiji (tahun 1889) Jepang kemudian memiliki Undang-Undang Dasar dan berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut dapat dikatakan bahwa Jepang adalah sebuah Monarki Konstitusional.² Konstitusi ini merupakan hukum konkrit pertama yang dimiliki Jepang, dan disusun untuk mengatur kekuasaan kaisar dan distribusi kekuasaan badan pemerintah di setiap aspek. Konstitusi yang mencontoh dari Jerman ini

¹ Mohamad Sudjiman, *Serba Serbi Tentang Jepang Dengan Ciri-ciri Khasnya*, Unsada, Jakarta, 1998, hlm. 191-192

² Syabbuddin Mangandaralam, *Menenal dari dekat Jepang sebagai Negara Matahari Terbit*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 32

terbagi atas 3 cabang kekuasaan negara yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi kedaulatan tetap ada di tangan kaisar.

Menurut Undang-Undang Dasar Meiji, Kekaisaran Jepang harus diperintah oleh kaisar (dari garis keturunan yang tidak terputus sejak berabad-abad), demikianlah dituangkan dalam pasal-pasalanya. Ketiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dipimpin langsung oleh kaisar. Dengan demikian semua alat negara termasuk menteri-menteri, melakukan fungsinya berdasarkan pada keputusan kaisar dan bertanggung jawab kepada kaisar, begitu pula dengan keputusan-keputusan penting yang bersifat kenegaraan, semua tergantung pada keputusan kaisar.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Meiji, muncul perasaan bangga di Jepang karena Undang-Undang Dasar telah dibuat tanpa adanya revolusi berdarah dan Jepang telah menjadi negara pertama di Asia yang pemerintahannya berdasarkan konstitusi. Undang-Undang Dasar Meiji juga disebut-sebut sebagai perubahan yang luar biasa sepanjang Undang-Undang Dasar tersebut menyertakan partisipasi nyata rakyat dalam persoalan-persoalan negara dan mencegah kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Meiji menempatkan Kaisar dalam posisi yang sangat tinggi. Kaisar yang oleh masyarakat Jepang dikatakan sebagai keturunan dewa matahari ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan bangsa Jepang. Kaisar juga ditetapkan sebagai kepala pemerintahan. Hal itu menjadikan kaisar sebagai sosok yang sangat penting dalam kancah pemerintahan Jepang. Dalam

Undang-Undang Dasar ini kaisar juga dikatakan suci, seperti yang ditegaskan dalam pasal 3 yang berbunyi "Kaisar itu suci dan tidak dapat diganggu gugat".³

Kaisar juga dapat mengeluarkan peraturan atau ketetapan tentang kemaslahatan bagi rakyat yang mempunyai kekuatan undang-undang. Ia dapat memerintah parlemen untuk bersidang dan membubarkannya. Selain itu, ditetapkan pula bahwa kaisar sebagai Panglima tertinggi angkatan perang, sehingga jika kaisar memberikan perintah kepada bawahannya, ia tidak perlu lagi mengadakan perundingan dengan Dewan Perwakilan Kekaisaran. Kaisar juga mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, serta menandatangani perjanjian-perjanjian kenegaraan (pasal 13). Dalam bidang hukum, kaisar berhak memberikan amnesti, keringanan hukuman, serta rehabilitasi (pasal 16). Namun demikian, walaupun kaisar mempunyai otoritas yang tinggi, kaisar tidak diharuskan menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya kaisar dibantu oleh pembantu terdekat yang bertanggung jawab langsung kepadanya.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, seluruh kepulauan Jepang berada di bawah kekuasaan pendudukan militer Sekutu (Amerika Serikat). Jepang senantiasa diawasi agar tidak kembali mempraktekkan pemerintahan militer yang haus perang. Untuk menghalangi kemungkinan yang tak diinginkan oleh pihak sekutu dan negara-negara lain di dunia yang cinta

³ Mohamad Sudjiman, *Op.cit.*, hlm. 191-192

damai, pada tanggal 3 November 1946 diumumkan sebuah Undang-Undang Dasar yang baru.⁴

Dalam beberapa hal yang bersifat prinsip, konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru tersebut tentu saja sangat berbeda dengan konstitusi jaman Meiji (1889). Konstitusi baru Jepang memuat beberapa pokok pengaturan kenegaraan. Dengan konstitusi baru tersebut kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kaisar atau kepala negara hanya melaksanakan tugas yang hanya diatur oleh konstitusi.

Pada pemaparan di atas disebutkan bahwa Jepang adalah negara kekaisaran namun secara formal Jepang adalah negara demokrasi yang berdasarkan paham trias politica, ada pemisahan yang sangat tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Demokrasi yang diterapkan di Jepang dewasa ini sudah dirintis sejak jaman Meiji. Gerakan demokrasi pada jaman Meiji merupakan suatu proses tahap permulaan dari pengenalan pemikiran demokrasi di Jepang. Proses ini lahir dalam masa transisi masyarakat feodal ke dalam masyarakat "modern". Dalam masa transisi ini terjadi pembauran antara unsur-unsur modern dengan tradisi. Hal ini mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat transisi, dan mencerminkan keadaan tahap permulaan pemikiran demokrasi sebagai dampak langsung dari peradaban dan pencerahan (Bunmei Kaika).

⁴ Syahbuddin Mangandaralam, *Op.cit.*, hlm. 32

Demokratisasi juga dianjurkan di bidang ekonomi dan berbagai pembaharuan dilaksanakan untuk mencegah bangkitnya kembali militerisme. Salah satu pembaharuan ini berupa perubahan dalam soal tanah pertanian, yaitu penghapusan sistem tuan tanah yang tidak mendiami tanahnya dan pembatasan pemilikan tanah oleh tuan-tuan tanah.

Sebenarnya pada kenyataannya di Jepang sejak kaisar mengumumkan Undang-Undang Dasar Meiji pada 11 Februari 1889 boleh dikatakan secara konstitusional tidak ada "demokrasi" dalam arti sebenarnya kecuali gerakan demokrasi yang memberikan warna dominan pada jaman Taisho. Hal ini juga diungkapkan oleh para penulis Amerika bahwa masyarakat Jepang tidaklah demokratis. Mereka mengambil contoh dari sikap orang Jepang terhadap orang Korea dan golongan minoritas Eta.

Memang pada awalnya tidak mudah bagi Jepang untuk melaksanakan demokrasi tersebut, karena masyarakatnya sudah terbiasa hidup dalam alam feodal yang berlangsung berabad-abad lamanya (1192-1867), salah satunya adalah pada susunan masyarakatnya yaitu tetap mempertahankan perbedaan tingkatan sosial misalnya dari segi bahasa yang digunakan.

Demokrasi di Jepang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat setelah berakhirnya Perang Dunia II, yakni setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Jepang yang sekarang. Dapat dikatakan demokrasi di Jepang sebenarnya adalah paham yang dipaksakan oleh tentara pendudukan sekutu untuk dijadikan

landasan negara Jepang setelah perang. Buat orang Jepang sendiri tidak ada pilihan lain, mereka harus menerima paham demokrasi itu.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang Kaisar dan Demokrasi di Jepang.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana demokrasi di Jepang dijalankan ?
2. Bagaimana kedudukan Kaisar dalam pemerintahan Jepang ?
3. Bagaimana sistem pemerintahan di Jepang ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi dari lahirnya demokrasi di Jepang sampai sistem pemerintahan yang dijalankan di Jepang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Demokrasi di Jepang.
2. Kedudukan Kaisar dalam pemerintahan Jepang.
3. Sistem pemerintahan Jepang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Bab I, Bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Bab ini merupakan pemaparan tentang sejarah Jepang sebagai negara kekaisaran dan perkembangannya menjadi negara yang memiliki Undang-Undang Dasar.

Bab III, Bab ini merupakan pembahasan tentang kedudukan kaisar di Jepang sebagai negara demokrasi.

Bab IV, Kesimpulan